

KERANGKA KEBIJAKAN SOSIO-BUDAYA MENUJU PERTANIAN 2025

Ke Arah Pertanian Pedesaan Berdaya Saing Tinggi, Berkeadilan dan Berkelanjutan

Tri Pranadji

*Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian
Jl. A. Yani 70 Bogor*

ABSTRACT

The condition of rural agriculture recently facing some big problems in particular the weakness of social capital, poverty and environmental degradation which are progressively on large scale. Vision of agricultural development 2025 is sustaining rural welfare which is characterized by highly competitive, equity and sustainable. One of very important agricultural policies is how to improve rural socio-culture regarding to most of rural people good opportunity in higher level of quality of life. Therefore, agricultural development 2025 will strongly require a comprehensive framework of socio-culture policy. There are five primary elements of socio-culture which must be developed in agricultural development 2025, that are human competency (or high quality of human capital), strong local leadership, value system, health agribusiness organization (and management) at village level, and equal social structure (being based on agrarian resources domination). It is highly recommend that framework of socio-culture policy is constructed by combination between time reference of change and level of society in one side, and elements of socio-culture which are being transformed in the other side. Social capital, such as rural law enforcement and governmental decentralization at rural level, have to be considered as the key to success in achieving rural community welfare. Some important aspects which must be paid attention to arrange good condition for running agriculture vision 2025 are to shift development orientation (from urban bias of non-agricultural resources based and footloose industrialization) toward rural industrialization base on local natural and human resources; agrarian reform base; strengthening of social control based on civil society; harmonization of partnership among government, rural-agricultural economic actors and community; and political arrangement which farmers have higher influence in political decision.

Key words: *socio-culture, policy, agricultural vision 2025, rural community welfare*

ABSTRAK

Pertanian pedesaan saat ini masih menghadapi tiga masalah besar, yaitu lemahnya modal sosial, kemiskinan dan kerusakan sumberdaya pertanian yang semakin membesar. Visi pembangunan pertanian 2025 yang sesuai adalah pertanian pedesaan yang berdaya saing tinggi, berkeadilan dan berkelanjutan. Salah satu kebijakan pembangunan pertanian yang penting adalah kebijakan pemberdayaan sosio-budaya pedesaan. Oleh karena itu pembangunan pertanian 2025 membutuhkan kerangka kebijakan sosio-budaya yang komprehensif. Ada lima elemen sosio-budaya utama yang harus dikembangkan, yaitu: kompetensi SDM, kepemimpinan lokal, tata nilai, keorganisasian (dan manajemen) usaha tingkat desa dan struktur sosial (berbasis penguasaan sumberdaya agraria). Kerangka kebijakan sosio-budaya mengacu pada kombinasi antara tingkat masyarakat dan jangka waktu di satu sisi, dan elemen sosio-budaya yang ditransformasikan di sisi lain. Modal sosial, seperti penegakan sistem hukum pedesaan dan desentralisasi pemerintahan hingga tingkat desa, harus dianggap sebagai kunci sukses pencapaian kesejahteraan masyarakat pertanian pedesaan berkelanjutan. Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mengkondisikan visi pertanian 2025 terwujud, yaitu: perlunya mengubah orientasi pembangunan (dari industrialisasi non-pertanian yang *footloose* dan bias kota) menjadi yang memihak pada industrialisasi pedesaan berbasis pertanian dan perbaikan sumberdaya agraria di pedesaan; pentingnya reformasi keagrariaan; pengembangan kekuatan kontrol masyarakat madani (*civil society*); sinergi (harmonis) atau *partnership* antara pemerintah, pelaku usaha pertanian di pedesaan dan masyarakat lokal; dan tatanan politik yang memberi posisi layak bagi petani pedesaan.

Kata kunci: *kebijakan, sosio-budaya, pertanian 2025, kesejahteraan pedesaan berkelanjutan*

PENDAHULUAN

Dengan mengambil teladan Kaisar Teno (Meiji), memandang pertanian dengan visi 25-50 tahun ke depan bukan sebuah pengkhayalan intelektual tanpa dasar, melainkan suatu keharusan untuk memandu ke arah mana pembangunan pertanian dijalankan. Layaknya membuat peta navigasi kapal induk (Departemen Pertanian) yang besar, jika melenceng dari awal niscaya mengembalikannya ke "jalan yang lurus" akan membutuhkan pengorbanan yang sulit dihitung. Brown (2002), *President of the Earth Policy Institute in Washington D.C.* (Amerika Serikat), menggambarkan pentingnya visi mewujudkan keberlangsungan kehidupan masyarakat pertanian pedesaan:

"... even within environmental community, we do not have a shared vision of what we want to do and where we want to go ... if we do not have a shared vision of where we want to go, the chances are that we will end up going where..."

Dalam *Delhi Sustainable Development Summit 2002* beberapa pakar menyatakan bahwa keberlangsungan kehidupan usaha (termasuk pertanian pedesaan) tidak hanya dilandaskan pada kendali material, seperti: *compliance-volume and resource-driven*; melainkan (lebih penting) dilandaskan pada kendali *trust-value and knowledge-driven*. Ini menunjukkan bahwa untuk mewujudkan visi pembangunan pertanian ke depan lebih mengandalkan aspek nilai non-material atau idealisme, terutama yang dilandaskan pada kemajuan aspek sosio-budaya. Duta Besar Jepang untuk India, Mitsuhei Murata, menyebutkan bahwa *"... the world seems to have lost idealism, ... the present material civilization threaten the spiritual sanity of future generations ..."* (Murata, 2002).

Merancang kebijakan pembangunan, termasuk pertanian, dalam kebijakan rentang 20-25 tahun telah dikenal di banyak negara. Jika kabinet baru terbentuk tahun 2005, sudah sewajarnya jika dituntut ada gambaran yang akan dituju pada 2025. Sangat kebetulan pada 2025 pembangunan (sektor) pertanian Indonesia paling tidak telah mencapai usia 80 tahun. Jika pada usia itu nanti sektor pertanian masih tidak mampu memberikan kontribusi yang

besar bagi kesejahteraan masyarakat pedesaan, maka bisa dinilai bahwa secara substansial kebijakan pembangunan pertanian yang dijalankan pemerintah selama ini boleh dinilai gagal. Kebijakan pembangunan pertanian dinilai tepat jika mampu memosisikan pertanian sebagai penggerak utama (kemajuan) ekonomi pedesaan (yang berdaya saing tinggi, berkeadilan dan berkelanjutan). Kliksberg (1999) mengatakan bahwa faktor kunci keberhasilan pembangunan adalah modal sosial dan budaya (*social capital and culture*). Jika konsep dasar atau paradigma yang melatarbelakangi pembangunan pertanian masih terus-menerus mengecilkan peran sosio-budaya, maka kegagalan demi kegagalan tinggal menghitung bilangan tahun ke tahun atau (bahkan) musim ke musim.

Timbulnya krisis multi dimensi yang nyaris meruntuhkan "rasa percaya diri" seluruh kehidupan sektoral, termasuk sektor pertanian, dapat dipandang sebagai akibat di masa lalu para perancang kebijakan pembangunan yang "terlalu percaya" pada kerangka kebijakan pembangunan berbasis budaya material dan pertumbuhan ekonomi tinggi ("*growth maniac*"). Amartya Sen, *Nobel Prize Winner* Ekonomi 1998 (Kliksberg, 1999), mengingatkan bahwa pembangunan yang selama ini menyandarkan diri pada pertumbuhan ekonomi ternyata diikuti dengan munculnya ratusan juta jiwa (manusia) yang mengalami kemiskinan dan kelaparan di negara dunia ketiga. Cucuran darah (*blood*), air mata (*tears*) dan keringat (*sweat*) mengiringi hampir setiap titik pencapaian angka pertumbuhan ekonomi.

Kerangka kebijakan sosio-budaya (atau kelembagaan masyarakat) pertanian seyogyanya tetap mengacu pada panduan ideal masyarakat Indonesia, yaitu ke arah terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur sesuai amanat UUD 1945. Oleh sebab itu, kebijakan sosio-budaya (pembangunan pertanian 2025) bisa dipandang sebagai perpaduan antara pandangan visioner ke depan dan hasil kajian empirik (di lapangan). Visi ke depan haruslah didasarkan atas pemikiran untuk mewujudkan sektor pertanian (di pedesaan) yang lebih baik dibanding sebelumnya. Visi yang dimaksud dapat dinyatakan sebagai: "sektor (atau masyarakat) pertanian yang berdaya saing tinggi, berkeadilan dan berkelanjutan". Kebijakan sosio-budaya (*social capital*)

and culture) 2025, dengan demikian, sebagai upaya mempercepat dan mengarahkan transformasi aspek sosio-budaya atau kelembagaan (pertanian) tradisional di pedesaan menuju terwujudnya tatanan sosio-budaya pertanian industrial berkelanjutan.

Untuk mewujudkan amanat UUD 1945 tersebut perlu melalui tahapan pencapaian daya saing masyarakat secara keseluruhan. Dalam jangka pendek, misalnya, tahapan yang perlu diperhatikan adalah pencapaian efisiensi teknis dan ekonomi sehingga dapat terpenuhi kebutuhan dasar masyarakat pedesaan. Dalam jangka menengah dan panjang harus bisa dicapai pembagian beban dan manfaat yang lebih adil, serta terwujudnya sistem pengelolaan sumberdaya publik dan lingkungan pedesaan sehingga perekonomian pedesaan bisa berkembang secara sehat dan berkelanjutan. Kerangka atau model kebijakan sosio-budaya untuk setiap masyarakat bisa dibedakan menurut tahap perkembangan masyarakat dan kondisi spesifik setempat, yang selanjutnya operasionalisasi kebijakan bisa dijalankan secara desentralistik di tingkat kabupaten/kota hingga desa.

Hasil pemikiran kritis para pakar pertanian secara lintas disiplin menunjukkan bahwa titik lemah pembangunan nasional pada periode 20 tahun terakhir adalah kurang disadarinya bahwa masa depan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia sangat ditentukan oleh kemajuan sektor pertanian di pedesaan. Jika ditelusuri lebih lanjut bahwa keterpurukan perekonomian nasional adalah akibat marginalisasi perekonomian (masyarakat) pertanian di pedesaan. Data Sensus Pertanian (2003) menunjukkan bahwa proporsi jumlah petani gurem meningkat dibanding 1993; bahkan dibanding seabad lalu lapisan petani gurem ini bertambah besar; Pranadji (2003). Pengembangan perekonomian masyarakat pedesaan hingga saat ini masih sebatas slogan. Kebijakan politik pemerintah selama lebih dari 20 tahun sangat mengabaikan perkembangan kelembagaan masyarakat pedesaan, sehingga “energi sosial” di pedesaan nyaris hancur dan tidak dapat diandalkan sebagai penggerak utama pembangunan pedesaan berbasis usaha pertanian.

Keberadaan lembaga perekonomian yang bisa langsung menyentuh kehidupan ekonomi pedesaan sangatlah penting. Namun

perlu dipertanyakan “Apakah masih ada lembaga perekonomian pedesaan yang secara utuh memiliki daya dorong kuat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat pedesaan?”. Menurut Pranadji (1986a) jika lembaga atau organisasi kampung (“tradisional”) lumpuh siap-siap saja bahwa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani atau pelaku ekonomi di pedesaan akan selalu menghadapi kemacetan serius. Dari hasil kajian kritis Pranadji (1986b) dan penelitian Sedjati *et al.* (2002) juga berhasil ditunjukkan bahwa organisasi atau kelembagaan perekonomian desa yang ditanam dari atas umumnya tidak mampu berkembang secara sehat dan berkelanjutan.

Pengembangan modal sosial-budaya erat kaitannya dengan mengatasi kemiskinan (Andre-Habisch, 1999). Walaupun mengatasi kemiskinan sangat penting, namun dalam kaitannya dengan menghela pembangunan pertanian pedesaan berkelanjutan, kebijaksanaan sosio-budaya perlu diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pertanian pedesaan secara menyeluruh. Tulisan ini mengetengahkan kerangka kebijakan sosio-budaya komprehensif yang mendukung hal tersebut. Sistematika penulisan tercermin uraian bab demi bab. *Pertama*, diketengahkan arah kebijakan sosio-budaya yang disejajarkan dengan arah transformasi budaya pertanian, dari yang berciri pertanian tradisional-sub-sisten ke pertanian modern-industrial. *Kedua*, diketengahkan kerangka transformasi sosio-budaya yang di dalamnya merangkai komponen budaya material, budaya non-material, agroekosistem pertanian, konsolidasi sistem usaha pertanian dan respon aktif masyarakat terhadap tuntutan hidup yang lebih baik dan globalisasi pasar. *Ketiga*, dikemukakan lima elemen sosio-budaya utama dan perannya bagi kemajuan masyarakat pertanian pedesaan. *Keempat*, diajukan sebuah kerangka atau model kebijakan sosio-budaya yang merangkai hubungan antara dimensi perubahan (transformasi) dan tingkat masyarakat di satu sisi, dengan elemen sosio-budaya yang ditransformasikan di sisi lain.

ARAH KEBIJAKAN SOSIO-BUDAYA

Mengingat arah pengembangan sosio-budaya pertanian mengandung (perpaduan)

antara visi (pemikiran ideal) ke depan dan kenyataan empirik (di lapangan), maka perumusan kerangka kebijakan sosio-budaya perlu mendapat dukungan visi teori yang memadai. Varma (1975), dengan mengutip pemikir Cobban (1953), berpendapat bahwa penggunaan ilmu politik dalam kaitannya dengan "pengendalian" masyarakat adalah tercabutnya instrumen moral atau etika dalam struktur keilmuan politik. Hal yang senada sepantasnya juga ditujukan pada struktur keilmuan sosial lainnya, termasuk ilmu ekonomi dan sosiologi. Sikap yang harus dianut perancang kebijakan sosio-budaya adalah pentingnya memasukkan aspek moral kolektif atau tata nilai sebagai bagian penting modal sosial dalam kebijakan pengembangan perekonomian pedesaan (Prakash, 2000).

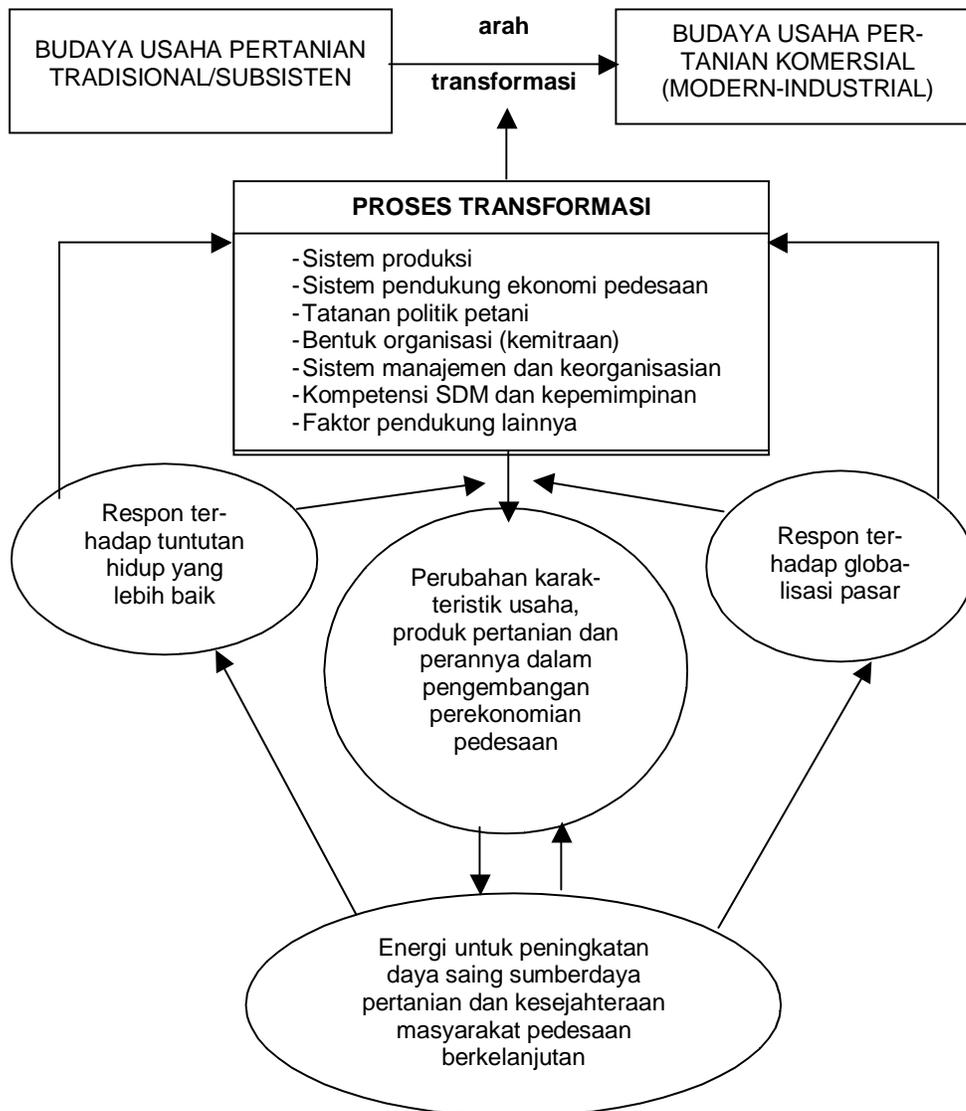
Pembangunan pertanian bisa dipandang sebagai bagian dari perancangan perubahan sosial (atau pembangunan pedesaan) ke arah tujuan tertentu. Sebagai komponen pembangunan pertanian, aspek sosio-budaya bisa diubah, atau (dengan bahasa yang lebih kasar) bisa direkayasa, untuk diarahkan dan disesuaikan dengan arah dan tujuan pembangunan perekonomian pedesaan (berbasis pertanian). Mengingat keamatan hubungan pertanian dan pedesaan (Kostov dan Lingrad, 2001), perekayasaan sosio-budaya ini berlaku juga untuk pemberdayaan kelembagaan tradisional di pedesaan. Dapat dikatakan bahwa arah transformasi (atau evolusi alamiah) sosio-budaya masyarakat (komunal) tertentu tidak salah, namun sering dijumpai kecepatannya relatif rendah. Bisa jadi juga, yang umum terlihat (dari sudut pandang ideal atau *das sollen*), transformasi sosio-budaya pedesaan yang sedang berjalan memang tidak mengarah pada tujuan pembangunan pertanian yang seharusnya dicapai; (disamping juga perkembangannya yang relatif lambat).

Sebagian besar kegiatan fisik (pembangunan) pertanian hingga saat ini berada di pedesaan. Mengikuti pendapat Dumont (1971) bahwa transformasi (usaha) pertanian dapat disejajarkan dengan perkembangan masyarakat pedesaan itu sendiri. Dipandang dari pengembangan modal sosio-budaya, transformasi pertanian mempunyai kesejajaran dengan proses modernisasi dan pembangunan masyarakat (pertanian di) pedesaan (Pranadji, 2003). Dalam pembangunan tadi

modal sosial harus dipandang sebagai faktor penggerak dan sekaligus akselerator utamanya. Jika transformasi sosio-budaya gagal dilakukan, peningkatan daya saing dan keberlanjutan perekonomian pedesaan akan menemui jalan buntu. Oleh sebab itu, perlu disadari bahwa kekuatan sosio-budaya bisa berubah atau dirubah ke arah atau diarahkan ke suatu tujuan tertentu, dan kebijakan (transformasi) sosio-budaya dalam pembangunan pertanian harus dibuat sedemikian rupa untuk mengefektifkan terwujudnya visi pembangunan pertanian 2025.

Kelemahan utama yang sering tidak dapat ditutupi dalam memajukan perekonomian masyarakat pedesaan adalah mengatasi "penyakit" kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang parah (Prakash, 1997). Disadari atau tidak penyakit ini sering menyusup dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pedesaan. Menyederhanakan penyelenggaraan pembangunan menjadi sekedar pemacu pertumbuhan ekonomi dan adopsi teknologi usahatani bisa dinilai sebagai kegagalan. (Perekayasaan sosio-budaya pertanian 20-30 tahun lalu lebih banyak untuk menopang visi peningkatan produksi dan pertumbuhan ekonomi tersebut). Para pakar, misalnya Brown (1986) dan Chiras (1985), telah memperingatkan jika pengelola negara cenderung memburu pertumbuhan ekonomi tanpa mengadakan perubahan struktur politik, ekonomi dan sosial ke arah yang lebih adil dan merata maka pembangunan yang dirancang kaum teknokrat ekonomi akan sangat mudah menemui kegagalan.

Landasan ideologi dalam pembangunan memang sangat diperlukan. Hanya saja terlalu naif jika dikatakan bahwa keberhasilan suatu pembangunan cukup diselesaikan pada dataran perumusan ideologi ekonomi (Pranadji, 2002). Tanpa penataan di bidang sosio-budaya, ekonomi dan politik yang mendukung operasionalisasi ideologi tersebut, transformasi atau pembangunan tidak akan mencapai sasaran yang efektif. Tatanan yang dimaksud haruslah yang memungkinkan dan mengarahkan pimpinan atau penyelenggara negara membagi barang dan jasa berdasarkan asas perataan dan keadilan. Dengan tatanan demikian akan dapat diwujudkan perbaikan kesejahteraan golongan rakyat miskin, meskipun sumberdaya yang dimiliki atau dikuasainya secara keseluruhan relatif terbatas. Sele-



Gambar 1. Transformasi Sosio-Budaya Sebagai Respon terhadap Tuntutan Hidup yang Lebih Baik dan Globalisasi Pasar (diadaptasi dari Pranadji, 2001)

bihnya tatanan sosio-budaya-ekonomi-politik yang dimaksud juga harus menjamin terpeliharanya agroekosistem dan lingkungan kehidupan masyarakat pedesaan di masa datang.

Pranadji (1995) menjelaskan bahwa transformasi (atau perubahan) usaha pertanian dari yang mencirikan kelembagaan usaha pertanian tradisional/subsisten ke yang mencirikan usaha pertanian modern/komersial secara berkelanjutan. Secara sederhana kerangka kebijakan (transformasi) sosio-budaya pertanian di pedesaan dapat diperlihatkan

pada Gambar 1. Dalam pengertian khusus, transformasi sosio-budaya pertanian di pedesaan merupakan respon dan antisipasi masyarakat terhadap tuntutan kemajuan (untuk hidup lebih baik) dan mempunyai kesiapan yang tinggi dalam memasuki globalisasi pasar. Dengan demikian kebijakan transformasi sosio-budaya tadi harus dijalankan sedemikian rupa sehingga proses tersebut bisa menjadi gejala alamiah dan proses aktif dari sistem masyarakat yang berada di belakang kegiatan pertanian di pedesaan. Upaya menjadikan atau mengantarkan per-

bahan sosio-budaya menjadi proses alamiah (yang dipercepat dan lebih terarah) dari masyarakat pertanian di pedesaan haruslah dipandang sebagai kebijakan sosio-budaya yang baik dan elegan.

KERANGKA TRANSFORMASI SOSIO-BUDAYA

Dari Gambar 1 terlihat transformasi sosio-budaya usaha pertanian dicirikan oleh perubahan yang mencakup aspek kaitan pasar dan orientasi ekonomi; jenis teknologi, (mutu) tenaga kerja, dan sumber energi yang digunakan; sumber modal, (mutu) manajemen, dan spirit usaha yang menggerakkannya; dan bentuk keorganisasian (kemitraan) usaha, pelayanan usaha, dan lainnya. Belajar dari pengalaman (industrialisasi) yang terjadi di Eropa Barat pada abad 17-19, yaitu pada proses berlangsungnya transformasi besar Polanyi (1957) dari peradaban (masyarakat) tradisional-agraris ke modern-industrial, transformasi tadi tidak otomatis melahirkan kesejahteraan sosial yang meluas. Selain itu transformasi tersebut belum dihadapkan pada tantangan untuk mempertahankan keberlanjutannya, terutama yang dilandaskan atas pemeliharaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

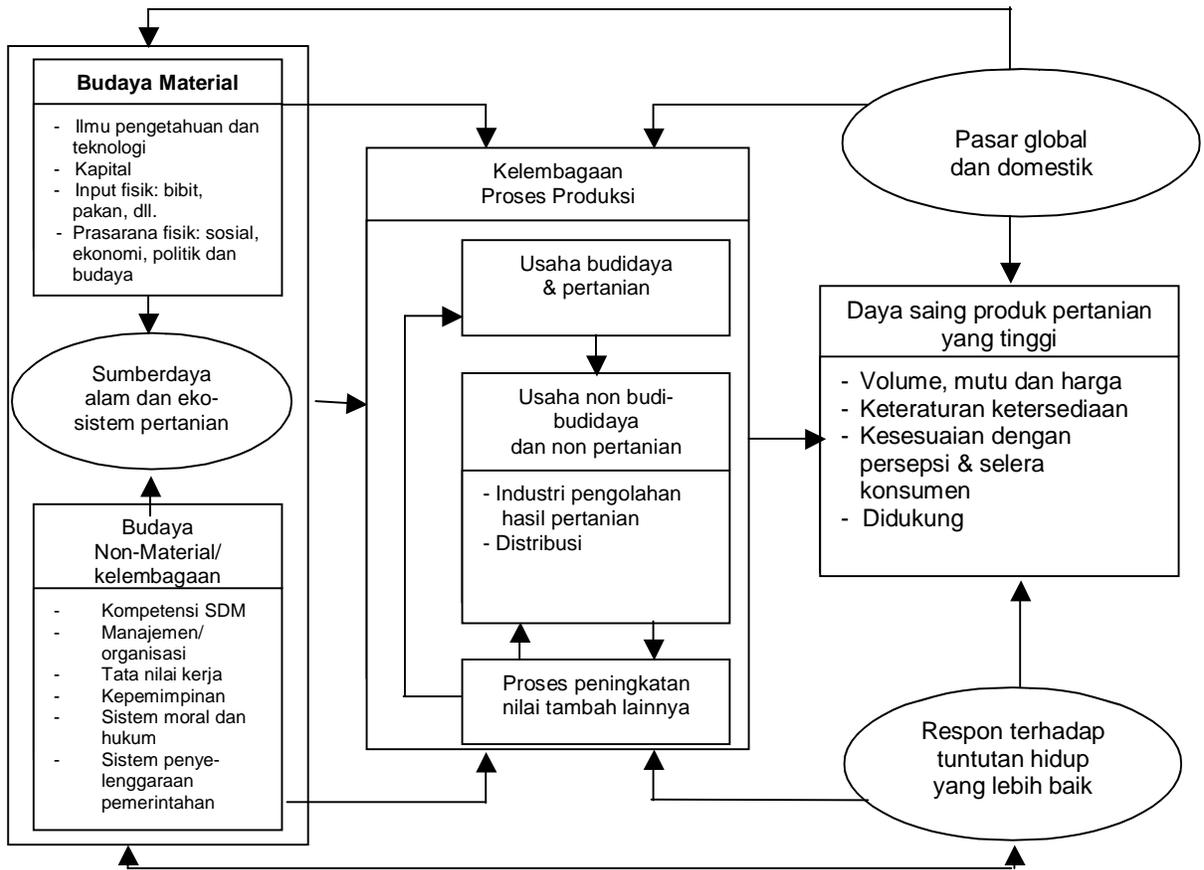
Selintas proses transformasi tadi memang memberikan gambaran gemilang dalam bentuk kemajuan fisik dan pertumbuhan ekonomi yang lumayan hebat. Namun pada saat yang hampir bersamaan industrialisasi tersebut melahirkan polarisasi sosial (Wertheim, 1976) dan kemiskinan (*pauperism*) yang tajam. Tanda yang kontras; transformasi (industrialisasi) tersebut telah melahirkan orang yang kaya raya berjumlah sedikit ("elite-kaya"), yang mendominasi sumberdaya publik di satu sisi, dan (menghasilkan) orang yang melarat berjumlah banyak ("massa miskin"), yang serba lemah di sisi lain. Beberapa dekade lalu pembangunan pertanian di Indonesia sedikit banyak telah mengulang apa yang terjadi di Eropa Barat tersebut.

Jika proses perkembangan atau transformasi sosio-budaya pedesaan diserahkan begitu saja pada penetrasi dan mekanisme ekonomi pasar, maka proses tersebut hampir dipastikan akan memberikan gambaran yang

suram bagi penyelenggaraan pembangunan (masyarakat) pertanian di pedesaan (Brown, 1986; Sudaryanto dan Pranadji, 2001; Sayogyo, 1974; Geertz, 1983 dan Geertz, 1989; dan Pranadji, 1995). Dalam perspektif pembangunan (pertanian) berkelanjutan (Van Dieren, 1995 dan Munasinghe, 1993), transformasi tadi harus juga mengindahkan aspek (partisipasi dan) keadilan sosial dan pemeliharaan daya dukung ekosistem setempat. Pembangunan yang semata-mata hanya mementingkan pertumbuhan ekonomi, atau *growth maniac* (Chiras, 1985), bukan saja akan melahirkan ketidakstabilan sosial-politik yang tinggi, namun juga akan melahirkan kehancuran daya dukung ekosistem. Pada gilirannya hal itu akan mengancam keberlanjutan proses transformasi atau pembangunan (masyarakat) pertanian itu sendiri.

Gambar 2 dapat dipandang sebagai kerangka atau paradigma pengembangan daya saing usaha pertanian dengan memperhitungkan aspek sosio-budaya setempat. Terlihat bahwa antara budaya material dan sosio-budaya atau budaya non-material dalam pengembangan usaha pertanian seyogyanya dipandang sebagai hal yang komplementer. Pada saat budaya material secara agregat dinilai telah memadai maka faktor sosio-budaya yang akan menentukan kemajuan perekonomian masyarakat pedesaan. Bahkan banyak pakar ilmu psikologi dan sosial, seperti Roepke (1984) dan Hagen (1962), menganggap bahwa faktor sosio-budaya yang banyak menentukan kemajuan perekonomian suatu masyarakat. (Aspek budaya material, terutama prasarana ekonomi atau *contracted capital* dan modal uang segar atau *financial capital*, semestinya didudukkan sebagai faktor penunjang kemajuan perekonomian masyarakat pedesaan; bukan faktor utama). Daya saing usaha pertanian di pedesaan harus dipandang sebagai output dari tatanan sosio-budaya pedesaan bersangkutan.

Dalam kerangka pembangunan yang dilandaskan pada wawasan geo-sosio-ekonomi-politik, maka perlu pemaduan yang harmonis pemanfaatan budaya material dan modal sosial setempat. Hubungan antara keduanya, jika dikaitkan dengan aktivitas nyata di lapangan, memiliki ciri hubungan sinergis. Dengan dapat dikembangkannya sistem usaha pertanian secara sehat (secara ekonomi,



Gambar 2. Paradigma Pengembangan Daya Saing Usaha Pertanian (atau Produk Pertanian) dengan Memperhitungkan Kelembagaan Pedesaan Setempat

sosial, politik dan lingkungan), maka sumberdaya alam dan ekosistem pertanian bisa dijadikan penggerak perekonomian masyarakat pedesaan setempat, yaitu melalui dihasilkannya produk pertanian yang berdaya saing tinggi di pasaran global maupun domestik. Perlu dikemukakan juga bahwa kemajuan pertanian umumnya menghasilkan efek berantai terhadap perkembangan ekonomi secara keseluruhan.

Kegiatan usahatani merupakan pembangkit dan pengembangan perekonomian (usaha pertanian atau) yang berbasis sumberdaya pertanian. Tanpa ada usahatani yang kuat dan efisien mustahil akan bisa dibangun suatu sistem usaha pertanian atau proses peningkatan nilai tambah sumberdaya pertanian yang kuat. Teknologi yang digunakan untuk itu tidak hanya mencakup bidang usahatani, misalnya: pola tanam dan pemberian input fisik (seperti pupuk, bibit dan obat-

obatan pertanian), namun mencakup juga teknologi untuk kegiatan pengolahan (misalnya: teknik mengolah dengan mesin yang efisien dan berstandar mutu tinggi), dan distribusi (misalnya: pengemasan dan pengangkutan). Dari gambaran ini terlihat bahwa teknologi tidak bisa dipisahkan dari kerangka kerja sistem sosio-budaya pertanian yang dikembangkan di pedesaan. Jenis teknologi yang tujuannya sekedar untuk menghasilkan produk pertanian bernilai tambah seadanya atau untuk pertanian subsisten berbeda dengan jenis teknologi untuk menghasilkan produk pertanian yang bernilai tambah tinggi dalam skala desa.

Pengertian teknologi bisa bersifat sederhana (parsial) dan bisa pula bersifat kompleks. Teknologi pemupukan tanaman pangan, misalnya, bisa dipandang sebagai sistem teknologi sederhana dan parsial. Namun (sistem) teknologi untuk menghasilkan

produk pertanian akhir yang bernilai tambah tinggi merupakan sistem teknologi yang bersifat kompleks dan komprehensif. (Sistem teknologi yang kompleks umumnya terkait dengan sistem kelembagaan yang mendukungnya). Dari sudut pandang transformasi perekonomian pertanian, pengertian teknologi untuk usahatani harus didudukkan pada sistem teknologi yang bersifat kompleks, dalam arti untuk tujuan menghasilkan produk pertanian yang berdaya saing tinggi di pasaran dan berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat pedesaan setempat, (bukan hanya untuk menghasilkan bahan mentah, misalnya gabah kering giling, yang belum stabil dan bernilai tambah rendah).

Dalam percepatan transformasi perekonomian pertanian, adopsi dan difusi teknologi usahatani bisa dipandang sebagai faktor penggerak atau *prime-mover*-nya. Hanya saja, pengertian teknologi yang dimaksud harus dibingkai dalam perspektif pengembangan kelembagaan usaha pertanian, yang arahnya adalah untuk menghasilkan produk pertanian yang berdaya saing tinggi. Agar sistem teknologi yang bersifat kompleks tadi betul-betul bisa menjadi penggerak nyata perekonomian pertanian (dan pedesaan) setempat, maka hal itu harus di-"senyawa"-kan dengan aspek budaya material lain (misalnya: modal finansial dan prasarana ekonomi) dan modal sosio-budaya setempat. Aspek sosio-budaya yang perlu diperhatikan mencakup kompetensi SDM (*human capital*), manajemen dan organisasi/kemitraan usaha pertanian yang sehat, tata-nilai (kerja) yang kuat, struktur sosial yang tidak timpang, sistem moral dan hukum yang mantap, dan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang lebih desentralistik.

ELEMEN SOSIO-BUDAYA UTAMA

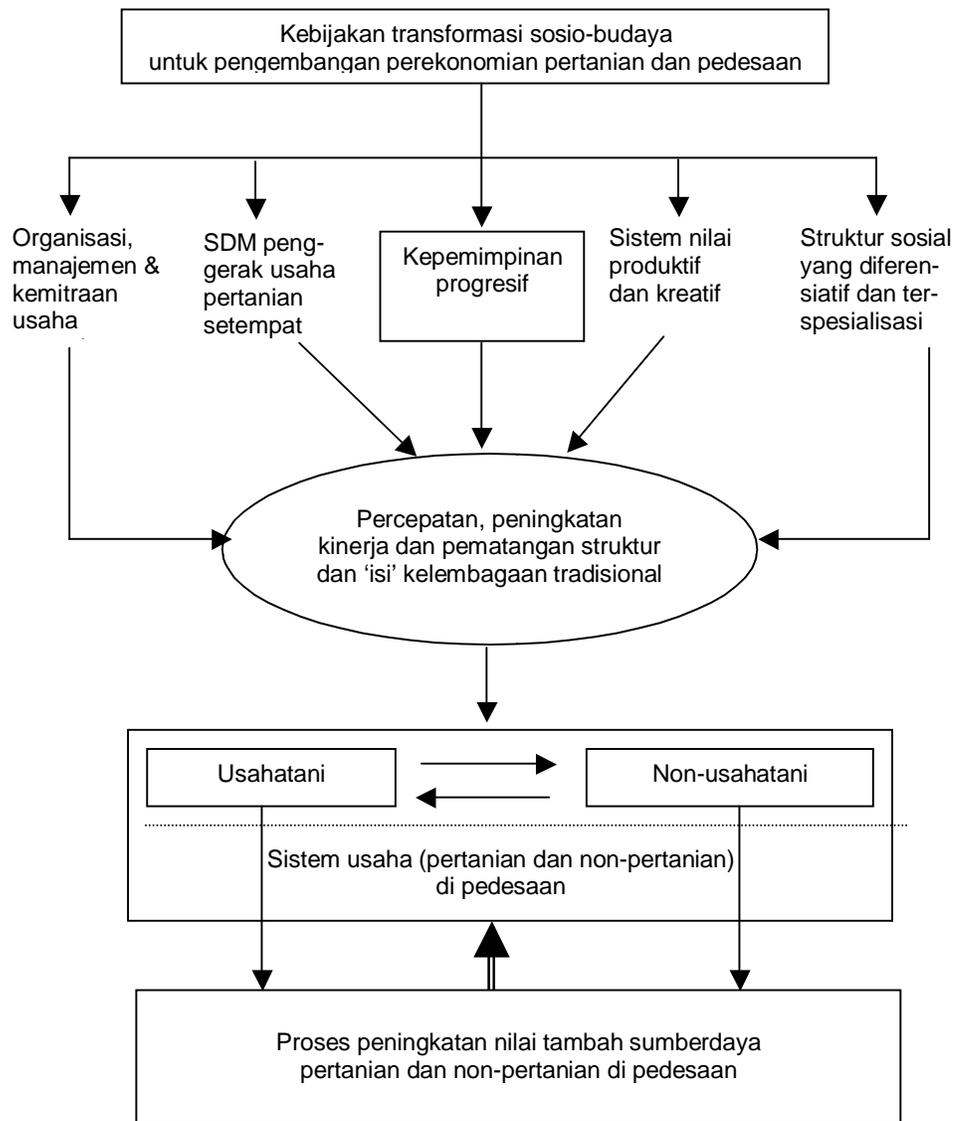
Kondisi sumberdaya dan ekosistem pertanian di Indonesia relatif beragam, dan hal itu membutuhkan variasi jenis (kompleks) teknologi untuk menanganinya sesuai dengan kondisi spesifik lokasi. Penyediaan teknologi (usahatani) secara fisik dari luar, terutama yang diperkenalkan secara *top-down* (oleh pemerintah), belum tentu sesuai dengan permasalahan atau agro-region setempat. Oleh sebab itu sangat wajar jika di berbagai tempat

ditemui gejala bahwa kebijakan atau program pembangunan pertanian tidak bisa diterima oleh sistem sosial setempat. Di lapangan juga banyak ditemukan bahwa pengembangan teknologi yang berasal dari luar, yang idealnya dijadikan "kunci pembuka" percepatan usaha pertanian setempat, dalam kenyataan justru menjadi penganjal transformasi sosio-budaya setempat. Pada gilirannya disamping sistem usaha pertanian di pedesaan tidak berkembang sesuai harapan, melainkan juga sistem sosio-budaya setempat mengalami kerusakan serius (Pranadji, 2003).

Elemen kebijakan sosio-budaya yang diperkirakan akan berpengaruh besar terhadap percepatan transformasi usaha pertanian (paling tidak) mencakup lima hal, yaitu: kompetensi sumberdaya manusia (SDM), tata nilai, keorganisasian usaha pertanian, kepemimpinan, dan struktur sosial (Pranadji, 2001). Kebijakan transformasi usaha pertanian dapat diartikan sebagai upaya memperbaiki atau meningkatkan kinerja dari kelima elemen sosio-budaya tersebut. (Kebijakan tersebut juga perlu diarahkan untuk mendukung proses pemberdayaan ekonomi pedesaan). Gambar 3 menunjukkan hubungan antara aspek sosio-budaya (tradisional) dan proses peningkatan nilai tambah sumberdaya pertanian dalam bingkai transformasi masyarakat pedesaan. Di samping setiap elemen sosio-budaya memerlukan perhatian khusus, namun hal yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mengintegrasikan dan mensejajarkan proses transformasi sosio-budaya pemerintah, masyarakat (komunitas) dan ekonomi pasar di pedesaan.

Organisasi/Kelembagaan Kemitraan Usaha

Kinerja aspek keorganisasian atau kelembagaan kemitraan usaha pertanian yang dinilai sehat, dalam arti memiliki daya saing tinggi, diperlihatkan pada Gambar 4. Jika kinerja kelembagaan usaha pertanian bisa dikembangkan secara sehat, hal itu memberi peluang bagi proses percepatan transformasi sosio-budaya untuk pengembangan perekonomian pedesaan. Kinerja kelembagaan usaha pertanian tadi ditentukan paling tidak oleh empat faktor (Pranadji, 2003), yaitu: *Pertama*, adanya konsolidasi antar cabang usaha pertanian; sehingga kegiatan usaha pertanian menjadi satu sistem usaha yang utuh dan asas MES (*Minimum Economics of Scale*) bisa ter-

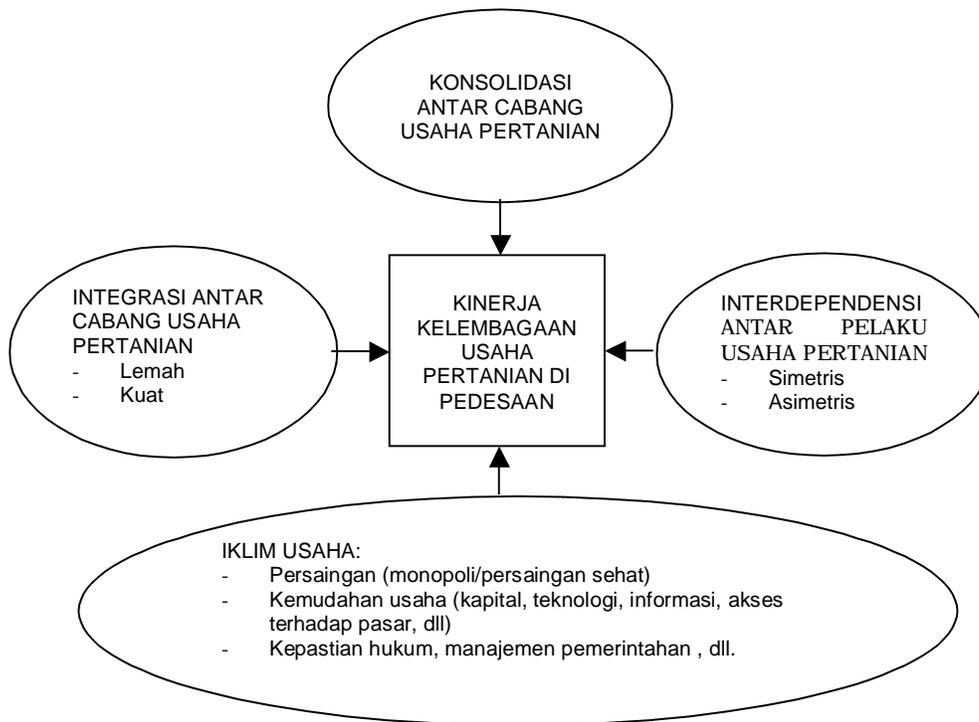


Gambar 3. Hubungan antara Aspek Sosio-budaya dan Proses Peningkatan Nilai Tambah Sumberdaya Pertanian dan Non-pertanian Melalui Transformasi Kelembagaan Tradisional di Pedesaan

penuhi. Dengan konsolidasi yang demikian usaha pertanian tidak lagi tersekat-sekat. Selama sekat-sekat masih belum dapat dihilangkan, saat itu pula peningkatan efisiensi dan daya saing usaha pertanian di pedesaan secara keseluruhan sulit ditingkatkan. Hubungan antar sekat berarti transaksi, sehingga semakin banyak sekat semakin banyak pula proses transaksi yang harus dilalui, dan semakin banyak transaksi akan cenderung semakin tidak efisien.

Memecahkan masalah inefisiensi tersebut tidak dapat diserahkan begitu saja pada

mekanisme kelembagaan ekonomi pasar, karena kondisi tersebut dalam jangka pendek relatif menguntungkan bagi para pemilik kapital besar yang umumnya mereka ini adalah pengendali sistem usaha pertanian di pedesaan. Secara bertahap sistem ini akan mengalami proses inefisiensi baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya maupun kesumberdayaan alam dan lingkungan. Dalam jangka panjang sistem ini hampir bisa dipastikan akan mengalami kehancuran bersama (*tragedy of the common*), dan hal ini bukan saja akan sangat merugikan pelaku usaha pertanian



Kelembagaan kemitraan secara umum mengikuti pola hubungan:

1. *Patron-client*
 2. Majikan-buruh
 3. Sistem pasar oligopsoni/monopsoni
- } Rentan terhadap tantangan global

Gambar 4. Kinerja Keorganisasian (Kemitraan) Usaha Pertanian yang Didukung oleh Faktor Konsolidasi dan Integrasi antar Cabang Usaha Pertanian, Penyehatan Iklim Usaha dan Interdependensi antar Pelaku Usaha Pertanian di Pedesaan

rakyat di pedesaan melainkan juga kehidupan generasi masyarakat pertanian mendatang. Idealnya kelembagaan ekonomi komunal di pedesaan yang dijadikan instrumen untuk mengubah tatanan kelembagaan ekonomi pasar yang tidak sehat.

Kebijakan sosio-budaya perlu diarahkan pada penguatan kelembagaan ekonomi di pedesaan. Hingga kini kinerja kelembagaan ekonomi di pedesaan umumnya masih lemah. Kelembagaan tradisional di tingkat (komunitas) desa sekuat lembaga Banjar di Bali pun hingga saat ini belum mampu memerankan sebagai dinamisor perekonomian pedesaan ke arah yang berdaya saing tinggi (Saptana *et al.*, 2003). Oleh sebab itu, kelembagaan pemerintah atau politik harus diberdayakan untuk bersama-sama dengan kelembagaan komunal menyusun kembali tatanan ekonomi

masyarakat pedesaan yang lebih sehat, adil dan berkelanjutan. Dengan kondisi kekuatan kelembagaan komunal yang relatif masih lemah perlu ditempuh pendekatan pengembangan hubungan kepercayaan antar individu dalam batas kontak muka (*face to face*). Secara politik, pengembangan kelompok tani bisa dijadikan titik awal transformasi perekonomian pertanian pedesaan.

Kedua, jika konsolidasi antar cabang usaha pertanian relatif sehat hal itu akan membuka peluang terjadinya pengintegrasian antar cabang usaha pertanian yang sehat pula. Dari pengamatan di lapangan, hingga dewasa ini tingkat integrasi antar cabang usaha pertanian relatif masih lemah. Kekuatan integrasi biasanya dipusatkan pada integrasi horisontal di tingkat usahatani. Mengasumsikan begitu saja bahwa jika integrasi horisontal

di tingkat usahatani telah kuat maka akan (otomatis) kuat pula integrasi vertikalnya hal itu dinilai sangat tidak realistis. Banyak kasus di lapangan menunjukkan bahwa lemahnya integrasi vertikal bisa menjadi sumber kemendakan dan kemacetan proses adopsi dan difusi teknologi di tingkat usahatani. Bahkan sering dijumpai, faktor kuatnya integrasi antar cabang usaha pertanian secara vertikal bisa menjadi "obat mujarab" bagi percepatan adopsi dan difusi teknologi di tingkat usahatani.

Ketiga, interdependensi antar pelaku usaha pertanian yang asimetris secara ekstrim menjadikan sistem usaha pertanian kurang tahan terhadap tekanan dan guncangan persaingan yang ketat. Interdependensi yang asimetris ini umumnya ditunjukkan oleh adanya konsentrasi penguasaan modal finansial pada salah satu atau keseluruhan cabang usaha pertanian. Gejala yang muncul akibat interdependensi yang asimetris tadi adalah adanya eksploitasi yang berlebihan antara golongan pelaku usaha pertanian "kuat" dengan golongan usaha pertanian "lemah". Si kuat "memeras" si lemah, dan kemudian (karena tidak efisien) sistem usaha pertanian sulit berkembang; walaupun dalam jangka pendek si kuat telah bisa memperoleh keuntungan berlebih.

Keempat, untuk meningkatkan daya saing sistem usaha pertanian diperlukan iklim usaha yang kondusif. Pemerintah pusat, daerah dan desa perlu mengembangkan iklim usaha yang kondusif, sehingga membuka peluang besar bagi terselenggaranya sistem perekonomian pedesaan yang sehat. Penyehatan iklim usaha di pedesaan harus dibebankan pada kelembagaan politik dan pemerintahan desa. Sebagai gambaran, pada saat iklim usaha tidak sehat, walaupun terdapat kelembagaan komunal yang kuat (seperti yang teramati pada organisasi Subak atau Banjar di Bali), lembaga usaha ekonomi apapun akan sulit berkembang. Kelembagaan komunal, seperti lumbung padukuhan (Pranadji, 1986b) dan kelompok sodalis tingkat kampung (Tjondronegoro, 1977) bisa diberdayakan untuk membantu penyehatan iklim usaha di pedesaan. Iklim usaha yang dinilai sehat untuk pengembangan usaha pertanian di pedesaan adalah yang memenuhi beberapa kriteria berikut:

- (1) Kecenderungan alamiah persaingan usaha (pertanian) ke arah praktek monopoli dan kartel hendaknya tidak dibiarkan oleh kelembagaan politik dan pemerintah setempat. Dewasa ini, karena kurang didukung pemahaman yang mendalam dan diagnosa terburu-buru, sering dijumpai bahwa intervensi pemerintah justru mempersubur praktek monopoli. (Praktek monopoli disamping tidak sehat atau hanya menguntungkan golongan kecil masyarakat dalam jangka pendek, juga menimbulkan gejala inefisiensi sistem kolektivitas masyarakat dan mengarah pada kehancuran bersama dalam jangka panjang). Dengan kondisi demikian daya saing usaha pertanian di pedesaan menjadi sulit meningkat dan tidak bisa diandalkan memasuki era globalisasi pasar.
- (2) Tersedianya kemudahan untuk mengembangkan usaha pertanian menurut komoditas dan sumberdaya yang digunakan hendaknya memperoleh perhatian pemerintah, terutama pada aspek pelayanan modal finansial, teknologi, informasi dan akses terhadap pasar. Dewasa ini ketimpangan pelayanan pemerintah masih sangat terasa, sehingga pelaku sosial di pedesaan tidak bisa ditransformasikan menjadi pelaku ekonomi yang andal.
- (3) Perlindungan dan kepastian hukum untuk menggairahkan pengembangan usaha pertanian di pedesaan perlu memperoleh perhatian serius. Dualisme hukum yang masih berlaku di pedesaan, yaitu hukum nasional (formal) dan hukum adat (informal), menyulitkan kelembagaan pertanian dan pedesaan berkembang sehat. Selain itu, pemahaman penyelenggara pembangunan terhadap praktek hukum masyarakat konsumen hasil pertanian di manca negara juga masih lemah. Sebagai contoh, pemerintah masih kurang mampu mencermati praktek (politik) *dumping* negara luar (dan juga pemberian subsidi input dan kebijakan impor) terhadap produk pertanian, dan tekanan diplomatik untuk memberikan hukuman yang tegas bagi pelaku usaha pertanian luar

negeri yang melanggar aturan sering tidak bisa dilakukan secara efektif.

Human Capital (SDM)

Kompetensi SDM merupakan salah satu komponen sosio-budaya yang penting dan sangat menentukan kemajuan perekonomian pedesaan, terutama yang didukung kegiatan pertanian. Pengembangan SDM di pedesaan untuk mendukung pengembangan usaha pertanian, terutama dari segi mutu atau keterampilan pelaku usaha pertaniannya, relatif masih kurang. Sampai kini, SDM pertanian (di pedesaan) masih tergolong di-"asing"-kan untuk mendukung pengembangan usaha pertanian modern di pedesaan. Disamping belum adanya program percontohan pengembangan usaha pertanian di pedesaan yang hebat, SDM yang siap "tempur" untuk membangun perekonomian pedesaan juga masih sangat kurang.

Jika apresiasi terhadap kegiatan usaha pertanian untuk pemberdayaan perekonomian pedesaan bisa ditingkatkan, dan mutu SDM-nya juga bisa ditingkatkan, besar kemungkinan pengembangan usaha pertanian di pedesaan sebagai basis kekuatan ekonomi nasional dalam beberapa tahun mendatang bisa diwujudkan. Agar kemajuan pertanian dan pedesaan bisa dicapai, idealnya semua SDM, dari petani hingga aparat pemerintah, yang terlibat dalam kehidupan dan pengembangan masyarakat pertanian pedesaan, haruslah memiliki kompetensi yang memadai. Komponen kompetensi yang dimaksud mencakup:

- (a) Keterampilan yang cukup pada individu, hal ini penting untuk peningkatan produktivitas individu dalam suatu bidang pekerjaan. Keterampilan individu menjadi salah satu ciri penting perkembangan kemajuan masyarakat pertanian dan pedesaan.
- (b) Kematangan emosional yang tinggi, hal ini penting untuk membangun hubungan yang bersifat *mutual respect*. Hubungan *interpersonal trust* sebagai landasan kerja kolektif haruslah didasarkan pada individu yang telah memiliki kematangan emosional relatif tinggi.
- (c) Kemampuan bekerjasama yang bersifat mutualistik, harus dipandang sebagai bagian penting dari upaya meningkatkan

produktivitas kerja individu melalui cara kerja yang terorganisasi dengan baik.

- (d) Apresiasi terhadap tata-nilai maju, hal ini paling tidak akan menghalangi timbulnya resistensi individu atau anggota masyarakat terhadap kebutuhan untuk maju bersama.
- (e) Apresiasi tinggi terhadap penggunaan ilmu pengetahuan di bidang manajemen dan keorganisasian usaha pertanian yang progresif.
- (f) Responsif terhadap kepemimpinan futuristik, hal ini memberikan peluang hadirnya sosok pemimpin yang bisa memandu masyarakat untuk lebih cepat maju dan terarah.

Tata Nilai Maju

Kemajuan perekonomian masyarakat sangat ditentukan seberapa jauh aspek kewirausahaan (Roepke, 1984) dan tata nilai kemajuan lainnya berhasil dijadikan penggerak usaha pertanian setempat. Sebagai gambaran, masyarakat Jepang memiliki energi kemajuan ekonomi yang relatif besar karena masyarakat Jepang secara kolektif memiliki rasa malu dan harga diri yang tinggi, kerja keras, rajin dan ingin memenangkan setiap kompetisi atau pertarungan di arena pasar terbuka. Dalam menjelaskan kemajuan perekonomian masyarakat, Weber (1964) menyatakan bahwa kemajuan perekonomian yang dicapai masyarakat Eropa pada abad 16-17 adalah adanya suntikan Etika Protestan ("*Protestant Ethics*"), yang di dalamnya terkandung tata nilai bahwa kerja adalah "amal-ibadah" yang wajib bagi manusia yang dianugerahi kehidupan.

Perkembangan perekonomian masyarakat pedesaan perlu mendapat dukungan tata nilai masyarakat yang mencerminkan kemajuan. Tata nilai yang dijalankan suatu sistem sosial umumnya telah mengalami pematangan yang relatif lama, bisa memakan waktu lebih seabad. Namun jika tata-nilai ini awalnya dikembangkan dalam sistem sosial yang relatif kecil, diperkirakan waktu yang dibutuhkan bisa relatif pendek. Beberapa komponen tata nilai yang perlu ditransformasikan di bawah ini bisa untuk mengidentifikasi dan menentukan gambaran kemajuan ekonomi yang akan dicapai suatu masyarakat, baik dalam tingkat kelompok tani, komunitas desa maupun negara,

yaitu: (a) Penghargaan terhadap kerja keras (tidak lembek); (b) Rajin (tidak malas); (c) Hemat (tidak menghabiskan aset staregis); (d) Produktif (tidak konsumtif); (e) Rasa malu dan harga diri tinggi (tidak *rai gedheg*); (f) Prestasi-kompetitif (*achievement orientation* atau tidak askriptif); (g) Sabar dan rendah hati (tidak pemaarah dan suka pamer); (h) Haus inovasi (tidak resisten terhadap inovasi); (i) Cara kerja/berpikir sistematis dan terorganisir (tidak acak dan semrawut); (j) Daya empati tinggi (tidak masa bodoh); (k) Rasional dan impersonal (tidak seenaknya dan mengikuti selera pribadi); dan (l) Bervisi jangka panjang yang jelas (menurut Bahasa Sunda tidak "*kumaha engke wae*").

Struktur dan Diferensiasi Sosial

Struktur sosial pada sistem usaha pertanian masih menunjukkan gejala relatif masih timpang dan mencerminkan kemiripan dengan ciri masyarakat feodal (Moore, 1967), yang mana diferensiasi sosial berkembang relatif lambat. Pelaku usaha pertanian mencerminkan dua kelompok besar, yaitu kelompok penguasa lahan luas (dalam jumlah sedikit) dan kapital berukuran besar di satu sisi, dan kelompok pelaku usaha pertanian berlahan sempit (dalam jumlah besar) dan kapital kecil di sisi lain. Gambaran relatif tajam ditemui pada usaha pertanian lahan kering, terutama usahatani hortikultura. Kelompok pelaku usaha pertanian yang memusatkan pada kegiatan jasa pengolahan dan pemasaran relatif jarang, dan kegiatan ini biasanya berasal dari luar desa. Akibatnya, proses "pelarian" nilai tambah ke luar desa sulit dihindarkan. Dalam kondisi demikian percepatan transformasi usaha pertanian di pedesaan menjadi sulit dilakukan dengan mudah. Adopsi dan difusi teknologi di tingkat usahatani pun mengalami ganjalan yang serius.

Salah satu kritik serius dalam modernisasi pertanian atau pembangunan yang dilandaskan pada paradigma pemikiran barat (westernisasi) adalah kurang menekankan pada perubahan struktur sosial. Salah satu cara untuk melihat perubahan struktur sosial adalah dengan memperhatikan perubahan struktur lapisan dan sistem interdependensi yang terjadi pada hubungan antar pelaku dan sekumpulan pelaku sosial yang terbentuk. Struktur sosial yang sehat adalah dicerminkan

adanya sistem pembagian kerja yang bersifat (solidaritas) organik yang sehat, sebagaimana digambarkan Durkheim (1938).

Struktur sosial sehat adalah cerminan dari diferensiasi dan spesialisasi pekerjaan yang sehat. Selanjutnya adalah apakah struktur sosial yang terbentuk di pertanian dan pedesaan disandarkan atas diferensiasi dan spesialisasi pekerjaan? Apakah sistem interdependensi yang terbentuk mencerminkan asimetrisasi yang ekstrim? Jika ya, hal itu mencerminkan struktur masyarakat yang timpang dan tidak produktif. Struktur sosial yang demikian umumnya memuat aspek diskriminasi ekonomi atau kelas (pemilikan dan penguasaan aset produksi dan aset berharga lainnya), kekuatan "askriptif" (misalnya: jabatan politik, struktur birokrasi kerja, perimbangan gender, keindahan tubuh dan keahlian khusus) dan derajat sosial atau *social dignity* (misalnya berdasar status hubungan perkawinan, keturunan, golongan suku atau ras tertentu, gelar dan penghargaan masyarakat).

Kepemimpinan

Dalam perspektif pembangunan atau perubahan sosial, Poensioen (1969) menyebutkan bahwa aspek kepemimpinan sangat menentukan kemajuan masyarakat (*leadership as a prime mover*). Aspek ini termasuk bagian sentral sosio-budaya masyarakat. Ada beberapa jenis tipe kepemimpinan, misalnya kepemimpinan karismatik (Weber, 1964) dan manajerial rasional. Menurut Jolliff (1993) kepemimpinan mencakup pengertian dijalanannya dua tipe kegiatan, yaitu *do right thing (leader)* dan *do thing right (manager)*. Kepemimpinan yang dibahas di sini bukan menekankan pada tipe kepemimpinannya, melainkan komponen apa saja yang menentukan suatu kepemimpinan bisa mendorong terjadinya kemajuan kelembagaan perekonomian masyarakat pedesaan (Pranadji, 2003). Komponen yang dinilai penting dalam sistem kepemimpinan yang dimaksud adalah:

- (a) Integritas personal yang tinggi (terpercaya, jujur dan adil) yang melekat pada pribadi seorang pemimpin yang sedang menjalankan kepemimpinannya.
- (b) Visi ke depan yang jelas dan implementatif yang dipunyai seorang pemimpin.

- (c) Kemampuan seorang pemimpin memberi inspirasi (*inspiring*) dan mengarahkan (*directing*) anggota masyarakat yang dipimpinnya.
- (d) Memiliki kemampuan untuk mengabdikan atau bersifat altruistik (tidak egois) pada masyarakat yang dipimpinnya. Pengertian altruistik ini bisa dikaitkan adanya "investasi kepercayaan", yang dengan kepercayaan itu seorang pemimpin bisa mengajak masyarakat untuk melakukan prediksi terhadap kebutuhan ke depan dan upaya untuk mencapainya.
- (e) Mempunyai keunggulan atau keistimewaan diri (spesifik) yang signifikan dan sangat interaktif dengan kebutuhan masyarakat.
- (f) Memiliki kemampuan dalam pemecahan konflik (*conflict resolution*) yang terjadi di masyarakat dan menggalang kebersamaan (*solidarity maker*) secara sukarela untuk mencapai *win-win solution*.
- (g) Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan anggota masyarakat yang dipimpinnya.
- (h) Mengajarkan penggunaan rasionalitas yang tinggi pada setiap pengambilan keputusan.
- (i) Menjunjung tinggi kewajiban untuk menegakkan sistem kerja kolektif dan demokratis terhadap masyarakat yang dipimpinnya.

Dari penjelasan di atas dapat dikemukakan bahwa seberapa jauh pengaruh faktor kepemimpinan dalam memajukan perekonomian masyarakat berkaitan erat dengan kandungan komponen kepemimpinan yang terdapat pada diri seorang pemimpin. Dengan menggunakan komponen tersebut juga dapat untuk melakukan penilaian seberapa jauh seorang pemimpin dapat menjadi penentu kemajuan perekonomian pertanian pedesaan. Dengan bantuan komponen kepemimpinan dapat dilakukan penganalisaan yang relatif tajam dan sekaligus melakukan upaya transformasi sosio-budaya pedesaan ke arah yang lebih kompetitif, adil dan berkelanjutan.

Manajemen Sosial

Manajemen sosial terkait erat dengan sistem pengambilan keputusan yang bersifat

kolektif. Untuk mengakomodasi kepentingan kolektif masyarakat pedesaan secara elegan, manajemen sosial yang sehat (*doing thing right*; Jolliff, 1993) perlu dijadikan bagian kehidupan masyarakat pedesaan, terutama melalui kelompok kecil dan kelompok komunal. Penerapan manajemen sosial ini pada akhirnya harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat pedesaan. Oleh sebab itu, transformasi di bidang manajemen sosial harus ditujukan pada ketiga kelembagaan pedesaan sekaligus, yaitu pada kelembagaan politik atau pemerintahan, kelembagaan ekonomi (pasar) dan kelembagaan komunitas pedesaan

Dalam bentuk pertanyaan, beberapa komponen penting dalam manajemen sosial yang dinilai menentukan kemajuan masyarakat pedesaan dapat diuraikan seperti berikut:

- (a) Apakah pengambilan keputusan bersama menerapkan prinsip transparansi dalam bentuk kejelasan informasi dan argumentasi yang digunakan?
- (b) Apakah asas akuntabilitas, dalam bentuk bisa dipertanggungjawabkan, diterapkan dalam setiap pengambilan keputusan bersama?
- (c) Apakah keputusan yang diambil mengikuti asas rasionalitas yang jelas?
- (d) Apakah pengambilan keputusan merepresentasikan kepentingan bersama dan dilakukan secara demokratis?
- (e) Apakah setiap keputusan yang diambil dapat dilakukan koreksi (diaudit secara terbuka) disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategisnya?

Hukum dan Pemerintahan

Aspek hukum dapat ditelusuri dari konsistensi antara norma ideal yang dirumuskan dalam bentuk aturan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa komponen hukum yang penting dikemukakan adalah: kepastian pengakuan terhadap kepemilikan dan penguasaan atas barang atau identitas suatu produk. Dengan kepastian tersebut seorang pelaku agribisnis atau pelaku sosial akan memiliki keyakinan terhadap apa yang diusahakannya, dalam kaitan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Aspek hukum lain yang tidak bisa diabaikan adalah

pembatasan praktek monopoli (agar keadilan, sesuai amanat UUD 1945, sosial lebih diutamakan dari pada pemanjaan kepentingan individu untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya), aturan main khusus (misal: aturan memasukkan produk dan investasi dari luar), dan penegakan hukum (*law enforcement*).

Aspek pemerintahan ditekankan pada pengaturan yang mengarahkan pada peningkatan kreativitas dan peran masyarakat agar tercapai tujuan kesejahteraan bersama. Hal penting yang perlu dikedepankan adalah perlunya ditegakkannya sistem pengelolaan kadaulatan dan kepercayaan masyarakat atau *public trust* (misalnya melalui perancangan dan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi penyelenggaraan pemerintahan). Sebelum ini masyarakat tidak secara apriori menolak praktek penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat monolitik dan sentralistik. Hanya saja, penyelenggaraan pemerintahan secara sentralistik beberapa dekade lalu tidak memberikan garansi tercapainya kesejahteraan dan keadilan sosial, sehingga dirasakan ada desakan serius untuk melakukan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan hingga tingkat II (setingkat kabupaten). Pertanyaannya adalah: "Sampai seberapa jauh kedaulatan masyarakat (pedesaan) masih menjadi fokus perhatian elit pemerintah dan politisi di daerah tingkat II?"

KERANGKA KEBIJAKAN SOSIO-BUDAYA

Kebijakan pembangunan masih belum memasukkan faktor sosio-budaya sebagai penggerak utamanya. Hingga kini belum ditemukan kerangka kebijakan sosio-budaya yang secara komprehensif bisa dijadikan panduan untuk memacu perkembangan perekonomian pedesaan secara sehat dan berkelanjutan. Keterpurukan pertanian dan pedesaan ini membutuhkan obat penyembuh yang digali dari "kecerdasan sosio-budaya" setempat. Oleh sebab itu, perancangan kerangka untuk mempercepat dan mempertajam transformasi masyarakat pedesaan ke depan (2025) perlu segera dirumuskan. Ciri yang harus diacu adalah:

(a) Kemajuan kegiatan ekonomi haruslah menjadi bagian dari akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa, kabupaten

dan pusat. Oleh sebab itu, penyelenggaraan perekonomian pedesaan haruslah cerminan dari kehidupan (sosio-budaya) sehari-hari masyarakat pedesaan. Hal ini baru mungkin jika kegiatan perekonomian pedesaan dikendalikan sepenuhnya oleh masyarakat pedesaan setempat, atau setidaknya telah mendapat persetujuan dari masyarakat pedesaan setempat. Keorganisasian atau kelembagaan politik atau pemerintahan desa harus mampu menggalang jaringan kerjasama dengan kelembagaan komunal dan kelompok-kelompok kecil di pedesaan.

- (b) Kegiatan ekonomi pedesaan tidak dikendalikan oleh penguasaan modal finansial yang bersifat terpusat pada satu pelaku atau hanya beberapa pelaku ekonomi. Sistem yang dapat membangkitkan kegiatan perekonomian pedesaan yang demikian haruslah didudukkan di atas landasan penataan politik atau pemerintahan desa yang mendapat kepercayaan kuat dari masyarakat pedesaan. Dengan pandangan demikian, kelembagaan ekonomi pedesaan merupakan komponen dari jaringan atau sistem sosio-budaya pedesaan secara utuh.
- (c) Produk kegiatan ekonomi harus sudah mengalami proses peningkatan nilai tambah maksimal. Mengingat proses peningkatan nilai tambah ini melibatkan banyak aspek, antara lain: teknologi, modal (finansial dan konstruksi), kompetensi atau *skill* pelaku ekonomi yang menjalankannya, kepemimpinan, keorganisasian usaha dan iklim usaha yang sehat. Oleh sebab itu, seluruh sistem usaha ekonomi pedesaan harus dipandang sebagai produk kolektif sistem sosio-budaya pedesaan setempat. (Pengembangan sistem usaha pertanian yang terekat-sekat seperti yang umum adalah salah satu sumber utama penyebab ketidakefisienan pengelolaan sumberdaya agraria di pedesaan).
- (d) Pengelolaan sumberdaya agraria, terutama tanah, masih menjadi titik lemah percepatan transformasi sosio-budaya pedesaan. Kelembagaan komunal yang relatif kuat, seperti Subak dan Banjar yang ada di masyarakat Bali (Saptana *et al.*, 2003), masih tidak mampu membendung "pengrusakan" tatanan agraris di pedesaan.

an. (Sistem hukum pertanahan tradisional di pedesaan sangat rentan terhadap infiltrasi ekonomi pasar. Dewasa ini kekuatan "hukum pasar" masih terlalu besar untuk ditahan oleh kelembagaan komunal di pedesaan, sehingga di pedesaan terjadi proses polarisasi penguasaan lahan yang cukup besar; dibarengi juga dengan pengalihan hak penguasaan lahan oleh masyarakat luar desa). Reforma agraria di pedesaan harus menjadi bagian integral transformasi sosio-budaya pedesaan.

- (e) Kegiatan perekonomian pedesaan haruslah mengutamakan atau berbasis pengelolaan sumberdaya setempat, sehingga sejauh mungkin dihindari *foot-loose economies*. (Salah satu titik lemah kegagalan industrialisasi pedesaan sebagai strategi pengembangan perekonomian pedesaan lebih lanjut adalah terlalu banyaknya penggunaan sumberdaya atau input produksi yang berasal dari luar desa). Selain itu, pengelolaan prasarana publik (*constructed capital*), sumberdaya alam dan agro-ekosistem pedesaan (*natural capital*) perlu memperhatikan asas keberlanjutannya.

Tabel 1 menunjukkan salah satu pandangan tentang tahapan transformasi sosio-budaya dilihat dari tingkatan sistem masyarakat, dimensi waktu dan aspek perubahan yang mungkin terjadi. Pandangan ini bisa dijadikan kerangka untuk memperkaya pembuatan model transformasi sosio-budaya pedesaan. Terdapat tiga tingkat sosio-budaya yang perlu dijadikan sasaran kebijakan, yaitu tingkat mikro (individu, keluarga atau satuan kecil

masyarakat yang ciri individualitasnya masih relatif menonjol), intermediet (kelompok atau asosiasi masyarakat dalam batas hubungan *face-to-face* dan jaringan *interpersonal trust*), dan masyarakat (organisasi kerja yang sudah didasarkan pada sistem kerja kolektif dan diferensiasi keahlian atau peran yang jelas). Dilihat dari dimensi waktu yang dijadikan acuan, transformasi sosio-budaya secara sederhana bisa dibagi dalam dimensi jangka pendek dan dimensi jangka panjang. Sebagai contoh, transformasi tata-nilai akan sulit dicapai dalam jangka pendek (Tipe 3), kecuali sebatas pengetahuan normatif atau kognitif (Tabel 1). Demikian juga evolusi kelembagaan akan sulit dilakukan pada tingkat individu dan jangka pendek (Tipe 1), dan hanya sangat mungkin jika diterapkan pada tingkat komunitas dan dalam jangka panjang.

Perlu dikemukakan bahwa Tipe 5 belum dapat diajukan sebagai model transformasi. Tipe 5 sebenarnya memberikan peluang yang lebih pendek, namun transformasi kelembagaan dengan pendekatan revolusioner pada kebanyakan masyarakat pedesaan di Indonesia masih kurang lazim dilakukan. Sebenarnya model transformasi kelembagaan dengan mengutamakan Tipe 5 bisa lebih efisien, namun hal ini memerlukan kekuatan kepemimpinan sosial-ekonomi-politik dan dukungan sistem politik yang sangat kuat. Pengalaman sulitnya melakukan reforma agraria bisa dijadikan bahan renungan bahwa pendekatan revolusioner dalam transformasi sosio-budaya memerlukan pemikiran yang lebih mendalam dan hati-hati. Di beberapa negara, pendekatan dengan Tipe 5 bisa dijalankan dengan baik, misalnya di Taiwan,

Tabel 1. Hubungan antara Tingkat Masyarakat, Dimensi Waktu dan Aspek yang Mungkin Dirubah Melalui Kebijakan Transformasi Sosio-Budaya Pedesaan

Dimensi waktu	Aspek perubahan menurut tingkat masyarakat (<i>Level of Society</i>) dalam proses transformasi sosio-budaya pedesaan		
	Mikro (Individu-Klp Kecil)	Intermediet (Kelompok)	Makro (Masyarakat)
	Tipe 1	Tipe 3	Tipe 5
Jangka pendek	Kompetensi SDM (1) Sikap dan tindakan (2) Tata nilai	(1) Tata-nilai (normatif) (2) Administratif dan manajemen sosial	(1) Inovasi-inovasi (2) Revolusi dan kepemimpinan
	Tipe 2	Tipe 4	Tipe 6
Jangka panjang	Siklus kebiasaan dan gaya hidup individual/keluarga/ klp kecil	Tata-nilai (aktual/kolektif), kepemimpinan, struktur dan keorganisasian sosial	Evolusi sosio-budaya/ kelembagaan secara menyeluruh

Keterangan: Model diadaptasi dari pemikiran Zaltman and Duncan (1977).

Korea dan Jepang. (Sedikit banyak penggunaan Tipe 5 ini diilhami pemikiran dialektik, yang biasanya dikaitkan dengan pemikiran revolusi sosial)

Walaupun sistem sosio-budaya pedesaan perlu dilihat secara utuh atau holistik dan integratif, namun komponen kelembagaan penyusunnya harus tetap bisa dilacak dengan baik. Masing-masing kelembagaan memiliki otoritas khas. Sebagai gambaran, wilayah (otoritas) kelembagaan politik atau pemerintahan memiliki otonomi, yang tidak begitu saja bisa dikendalikan atau diintervensi oleh kelembagaan ekonomi pasar dan kelembagaan komunal. Demikian juga hal ini berlaku pada kelembagaan ekonomi pasar dan kelembagaan komunal. Dengan gambaran bahwa setiap kelembagaan mempunyai wilayah (otoritas yang bersifat) otonom, maka terhadap masing-masing elemen perlu dibuat model transformasi sosio-budayanya.

Di bawah ini dikemukakan ilustrasi ringkas tentang kerangka kebijakan sosio-budaya untuk pengembangan perekonomian kerakyatan berbasis pertanian di pedesaan. (Model ini dikembangkan dan didasarkan atas pengamatan empirik di lapangan, selama belasan tahun, dan kajian literatur). Dengan membuat tiga penggolongan kelembagaan (politik/pemerintahan, komunal dan pasar) dapat diajukan kerangka atau model kebijakan sosio-budaya seperti berikut:

Model Kelembagaan Politik dan Pemerintahan

Secara umum model transformasi kelembagaan politik dan pemerintahan desa di daerah yang masyarakatnya memiliki tingkat kemajuan relatif lambat dan dengan budaya lokal yang tidak terlalu kental lagi, perlu mengacu pada kombinasi Tipe 1, Tipe 3, Tipe 4 dan Tipe 6 (Tabel 1); sedangkan untuk desa yang kelembagaan dan kepemimpinan lokalnya relatif kuat, disarankan mengacu pada kombinasi Tipe 3, Tipe 4 dan Tipe 6. (Jika kompetensi SDM yang ada relatif sudah baik, maka dalam model ini tidak perlu mengikuti Tipe 1 dan Tipe 2). Dapat dikatakan bahwa pada desa-desa yang relatif lambat kemajuannya, maka elemen sosio-budaya yang dimasukkan dalam model transformasi kelembagaan politik dan pemerintahan desa perlu lebih banyak dibanding.

Model Kelembagaan Komunal

Model transformasi kelembagaan komunal di Bengkulu (yang telah melemah) perlu mengacu pada kombinasi Tipe 1, Tipe 2, Tipe 3, Tipe 4 dan Tipe 6. Untuk kasus di Bali (yang masih relatif kuat) Tipe 1, Tipe 2 dan Tipe 5 relatif tidak diperlukan. Model transformasi kelembagaan komunal di Bali cukup mengacu pada kombinasi Tipe 3, Tipe 4 dan Tipe 6. Kondisi awal masyarakat komunal di Bali relatif lebih baik dibanding di Bengkulu, sehingga elemen kelembagaan yang perlu ditransformasikan relatif lebih sedikit.

Model Kelembagaan Ekonomi Pasar

Model transformasi kelembagaan ekonomi pasar di daerah tingkat kemajuannya relatif masih lambat perlu mengacu pada kombinasi Tipe 1, Tipe 2, Tipe 3, Tipe 4 dan Tipe 5. Pada kasus daerah yang tingkat kemajuannya sudah tinggi Tipe 2 relatif tidak diperlukan. Model transformasi kelembagaan ekonomi pasar di daerah yang demikian cukup dengan mengkombinasikan Tipe 1, Tipe 4 dan Tipe 6. Seperti pada kelembagaan politik dan komunal, di daerah yang tingkat kemajuannya sudah relatif tinggi elemen kelembagaan tradisional yang perlu ditransformasikan bisa lebih selektif dan jumlahnya sesedikit mungkin.

Ketiga model transformasi (kelembagaan pemerintahan atau politik, komunal dan ekonomi pasar) pada dasarnya bisa saling diintegrasikan hingga terbentuk model transformasi tunggal, karena elemen sosio-budaya yang mengisi ketiga kelembagaan pedesaan tidaklah berbeda. Dengan mentransformasikan setiap elemen sosio-budaya ke arah yang menunjukkan ciri masyarakat yang lebih maju (pertanian pedesaan industrial), hal itu bisa diartikan bahwa kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan memperoleh suntikan energi ganda. Jika setiap elemen sosio-budaya berhasil ditransformasikan, maka kemajuan perekonomian pedesaan tinggal menunggu waktu.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Jika dalam 20 tahun mendatang peran pertanian pedesaan semakin tidak dapat diandalkan maka hal itu bukan saja berbahaya bagi kelangsungan kehidupan masyarakat pedesaan, melainkan juga sebagai "lampu

merah” bagi masa depan bangsa Indonesia. Pada 2025 mendatang paling tidak ada tiga titik kritis yang harus dilewati bangsa ini, yaitu (a) lemahnya daya saing sistem usaha pertanian, (b) ketidak-adilan pelayanan pemerintah terhadap pelaku usaha pertanian di pedesaan, dan (c) tidak dipikirkannya secara sistematis keberlanjutan sistem usaha pertanian pedesaan. Visi pembangunan pertanian 2025 yang tepat adalah mewujudkan pertanian pedesaan berdaya saing tinggi, berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi tersebut perlu didukung perumusan kerangka kebijakan sosio-budaya yang sesuai, dalam arti bisa menciptakan modal sosial dan tatanan masyarakat (*civil society*) yang kondusif untuk pencapaian visi tersebut.

Kebijakan sosio-budaya memadukan dua hal pokok, yaitu visi pembangunan dan kenyataan empirik di lapangan. Arah kebijakan adalah seperti halnya “jarum penunjuk” ke tujuan mana kapal induk (Departemen Pertanian) digerakkan dan dikendalikan, yaitu untuk mewujudkan masyarakat pertanian pedesaan yang sejahtera dan berkelanjutan. Kebijakan sosio-budaya merupakan instrumen untuk mentransformasikan budaya usaha pertanian pedesaan dari yang berciri tradisional/subsisten ke arah pertanian industrial. Dua “sayap transformasi” yang harus dikendalikan adalah peningkatan respon terhadap tututan hidup yang lebih baik di satu sisi dan penyikapan terhadap globalisasi pasar. Arah penyikapan adalah terbangunnya energi untuk peningkatan daya saing sumberdaya pertanian dan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara berkelanjutan.

Bentuk akhir dari proses transformasi sosio-budaya adalah terjadinya perubahan karakteristik usaha pertanian, nilai produk pertanian yang dihasilkan dan peran pertanian dalam pengembangan perekonomian pedesaan yang lebih menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Beberapa komponen sosio-budaya yang penting ditransformasikan adalah tatanan politik petani, organisasi kemitraan usaha, manajemen, kepemimpinan dan kompetensi SDM, tata nilai dan sistem penyelenggaraan pemerintahan. Penegakan hukum perlu dilakukan untuk memberikan “payung” kepastian dan keadilan hukum yang mengikat semua pelaku usaha pertanian dalam menciptakan sistem persaingan usaha yang sehat.

Untuk mencapai bentuk akhir kelembagaan usaha pertanian pedesaan yang berdaya saing tinggi diperlukan bingkai transformasi sosial-budaya pertanian pedesaan, yang dengan bingkai tersebut dimungkinkan bisa tergalang partisipasi dari semua *stakeholder* pembangunan pertanian. Sinergi atau kemitraan (*partnership*) tiga kekuatan kelembagaan (kelompok *stakeholder*) pembangunan pertanian, yaitu: pemerintah, pelaku usaha pertanian dan masyarakat atau komunitas pertanian pedesaan, harus dibangun secara sehat. Media masa diarahkan untuk membangun imajinasi publik tentang pentingnya membangun sinergi tersebut di tingkat desa, paling tidak kabupaten.

Pertanian 2025 perlu mensinkronisasi tiga aspek penting, yaitu peningkatan nilai tambah atau daya saing usaha pertanian (mencakup pentingnya pengembangan prasarana dan pelayanan usaha ekonomi mikro di pedesaan), harmonisasi faktor lingkungan dan sumberdaya alam (pertanian), dan pengembangan sosio-budaya pertanian di pedesaan. Berkaitan dengan itu penentuan pemimpin dan manajer yang sensitif untuk pembangunan pertanian ke depan menjadi hal yang kritis. Meskipun keduanya harus memfokuskan pada upaya maksimisasi nilai penerimaan pengusaha pertanian, inti pembelajaran usaha pertanian harus mampu mengintegrasikannya dengan tanggung jawab sosial dan pengelolaan lingkungan untuk keberlanjutan usaha pertanian pedesaan.

Elemen sosio-budaya lain yang sangat penting dibangun adalah kompetensi SDM pertanian pedesaan (terutama kalangan generasi mudanya), tata-nilai dan struktur sosial (berbasis penguasaan sumberdaya agraria setempat). Saat ini ketiga elemen sosio-budaya ini masih belum mendukung visi pembangunan pertanian 2025. Terbentuknya sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government* dan desentralistik) hingga tingkat desa dan kabupaten merupakan syarat sosio-budaya yang harus dipenuhi. Transformasi sosio-budaya ke arah ini harus dibarengi dengan terbentuknya sistem sosial pedesaan yang daya kritis tinggi terhadap setiap kebijakan pemerintah yang tidak memihak pada peningkatan daya saing masyarakat pedesaan dan pemeliharaan sumberdaya agraria di pedesaan.

Kerangka kebijakan sosio-budaya perlu memperhatikan aspek perubahan (transformasi) elemen-elemennya dikaitkan dengan tingkat masyarakat (individu-kelompok kecil, komunitas dan masyarakat makro) dan dimensi waktunya. Sebagai gambaran, perubahan sosio-budaya secara menyeluruh (tipe 6) ditempuh secara evolutif hingga tingkat masyarakat makro (negara). Jika hal ini ditempuh dalam jangka pendek, konsekwensinya harus dilakukan dengan pendekatan tangan besi (revolusi) yang dikendalikan melalui sistem kepemimpinan dan pemerintahan terpusat dan pemimpin yang sangat kuat (dan terpercaya). Setiap kombinasi optimal antara tingkat masyarakat dan dimensi waktu terdapat elemen sosio-budaya yang bisa ditransformasikan secara sistematis.

Beberapa saran penting dalam menciptakan kondisi yang sesuai untuk mewujudkan visi pertanian 2025 adalah:

- (1) Di tingkat pemegang kebijakan pusat Jakarta harus ada perubahan visi pembangunan, yang semula mementingkan pertumbuhan ekonomi industri (berbasis non-pertanian yang *footloose*) dan perkotaan, menjadi lebih mengutamakan industrialisasi pedesaan berbasis usaha pertanian yang tidak ekstraktif terhadap sumberdaya agraria di pedesaan.
- (2) Reforma agraria (di pedesaan), sebagai bagian tahapan pencapaian visi pertanian 2025, perlu dijadikan langkah sistematis ke arah pembangunan pertanian yang terintegrasi dengan pembangunan pedesaan.
- (3) Desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan harus mencerminkan kedaulatan masyarakat lokal. Pandangan elit politik dan intelektual perkotaan yang memandang bahwa bahwa masyarakat pedesaan tidak mampu menjalankan sistem pemerintahannya harus direvisi drastis. Oleh sebab itu implementasi desentralisasi hingga tingkat desa merupakan kunci sukses pembangunan pertanian 2025.
- (4) Kerangka kebijakan sosio-budaya harus bisa memandu pemegang kebijakan publik untuk mengintegrasikan tiga masalah mendasari pembangunan pertanian, yaitu, peningkatan nilai tambah usaha pertanian di pedesaan, mengatasi kemiskinan (dan pengangguran) dan kerusakan sumber-

daya pertanian di pedesaan yang semakin hari semakin besar.

- (5) Pelaksanaan penegakan sistem hukum harus memberi ruang bagi pemberdayaan ekonomi kerakyatan di pedesaan hingga tingkat desa. Sistem usaha pola kartel dan monopoli usaha perorangan pada kegiatan pertanian dan sektor ekonomi yang terkait harus dihapuskan dengan tegas.

DAFTAR PUSTAKA

- Andre-Habisch, E. 1999. Social Capital, Poverty Reduction and 'Gesellschaftsordnungspolitik'. 'Workshop of the Workshop' 2 Conference, June, 9-13, IUB. <http://www.indiana.edu/~workshop/wow2/publications/jum1199.pdf>. [19/03/2004].
- Brown, L. 1986. Kembali di Simpang Jalan: Masalah Kependudukan dengan Sumberdaya Alam. C.V. Rajawali. Jakarta.
- Brown, L. 2002. Keynote Address 4. Delhi Sustainable Development Summit 2002. Summit Bulletin, 11 February 2002. <http://www.teriin.org/dsds/dsds2002/bulletin/11feb.pdf>. [26/04/04].
- Chiras, D.D. 1985. Environmental Science: A Framework for Decision Making. The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc. Menlo Park.
- Dumont, R. 1971. Agriculture as Man's Transformation to The Rural Environment. In Peasants and Peasant Societies (Edited by T. Shanin). Penguin Book Inc. Middlesex.
- Durkheim, E. 1938. The Rule of Sociological Method: The Classic Discussion of the Validity of the Application of Scientific Techniques to the Study of Social Phenomenon. MacMillan Publishing C., Inc. London.
- Geertz, C. 1983. Involusi Pertanian: Suatu Proses Perubahan Ekologi di Indonesia. Bhartara Aksara. Jakarta.
- Geertz, C. 1989. Penjaja dan Raja. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Hagen, E. 1962. On The Theory of Social Change: How Economics Growth Begins. The Dorsey, Inc. Illinois.
- Jolliff, G.D. 1993. New-Crop Development as Part of Sustainable Agriculture. Proceedings of Enviro/Economic Sustainability Workshop. -A Policy Discussion Including Agricultural,

- Environmental & Industry Interests, 8-9 December 1993, Chicago. Co-sponsored by The AARC Center, USDA & The Leopold Center, Iowa State University. <http://www.hort.purdue/newcrop/articles/aarc-leopld.pdf>. [24/03/2004].
- Kliksberg, B. 1999. Social Capital and Culture: Master Keys to Development. *Cepal Review*, 69, December 1999. http://www.ecalc.cl/publicaciones/Secretaria_Ejecutiva/7/lcg2067/kliksberg.pdf. [19/03/2004].
- Kostov, P and J. Lingrad. 2001. Integrated Rural Development – Do We Need a New Approach?. 73rd Seminar on the European Association of Agricultural Economists, 28030 June 2001, ANCONA. http://nwu.fig.net/pub/morocco/proceedings/TS4/TS4_3_gur_et_al.pdf. [07/04/2004].
- Lauer, R.H. 1982. *Perspectives on Social Change*. Allyn and Bacon, Inc. Boston.
- Moore, B. Jr. 1967. *Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the New World*. Beacon Press. Boston.
- Murata, M. 2002. As they said... Delhi Sustainable Development Summit 2002. *Summit Bulletin*, 11 February 2002. <http://www.teriin.org/dsds/dsds2002/bulletin/11feb.pdf> [26/04/04].
- Munasinghe, M. 1993. *Environmental Economics and Sustainable Development*. World Bank Environment Paper Number3, Washington D.C.
- Poensioen, J.A. 1969. *The Analysis of Social Change Reconsidered: A Sociological Study*. The Hague. Paris.
- Polanyi, K. 1957. *The Great Transformation: the Political and Economics Origins of Our Time*. Beacon Press. Boston.
- Prakash, S. 1997. *Poverty and Environment Linkages in Mountain and Uplands: Reflection on the "Poverty Trap" Thesis*. CREED Working Paper No 12, February 1997. Collaboration Research in the Economics of Environment and Development, IIED. London. <http://www.iied.org/docs/eep/creed12e.pdf>. [19/03/ 2004].
- Prakash, S. 2000. Social Capital and the Rural Poor: What Can Civil Actors and Policies Do? *in* *Social Capital and Poverty Reduction: Which Role for the Civil Society Organizations and the State?* Social Human Science Sector of UNESCO. http://www.unesco.org/most/soc_cap_sym_p.pdf. [24/03/04].
- Pranadji, T. 1986a. Subsidi Pupuk, Dilema Kualitas, Hingga Organisasi Tani. *Forum Ekonomi*, V(38):18-21, Desember 1986. ISEI. Jakarta.
- Pranadji, T. 1986b. Pengembangan Lumbung Padukuhan: Alternatif Mengaktifkan Per-ekonomian Desa. *Forum Ekonomi*, V(29):46-49, Maret 1986. ISEI. Jakarta.
- Pranadji, T. 1995. *Wirausaha, Kemitraan dan Pengembangan Agribisnis Secara Berkelanjutan*. Analisis CSIS, XIV(5):332-343. Center for Strategic and International Studies. Jakarta.
- Pranadji, T. 2001. Pendekatan Sosio-Budaya Dalam Transformasi (Pembangunan) Agribisnis Berkelanjutan. *dalam* Prosiding "Perspektif Pembangunan Pertanian dan Kehutanan Tahun 2001 ke Depan, (Penyunting: I W Rusastra dkk.). Buku I: 46-62. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Pranadji, T. 2002. Gejala Kesenjangan antara Ideologi dan Pragmatisme Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pedesaan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 20(2):47-59, Desember 2002. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Pranadji, T. 2003. Menuju Transformasi Kelembagaan dalam Pembangunan Pertanian dan Pedesaan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor
- Roepke, J. 1984. *Kewirausahaan dan Perkembangan Ekonomi Indonesia*. *dalam* Masalah-masalah Pembangunan: Bunga Rampai Antropologi Terapan (Penyunting: Koentjaraningrat). LP3ES. Jakarta.
- Sajogyo. 1974. *Modernization without Development in Rural Java*. (A Paper Contributed to the Study on Changes in Agrarian Structure, FAO of UN, 1972-1973). Bogor Agricultural University. Bogor.
- Saptana, T. Pranadji, Syahyuti dan Roosganda E.M. 2003. Transformasi Kelembagaan Tradisional untuk Menunjang Ekonomi Kerakyatan di Pedesaan: Studi Kasus di Propinsi Bali dan Bengkulu. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Sedjati, W.K., T. Pranadji, Syahyuti dan H. Tarigan. 2002. Strategi Keorganisasian Petani untuk Pengembangan Kediri Per-ekonomian Pedesaan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.

- Sudaryanto, T. dan T. Pranadji. 2001. Beberapa Pokok Pikiran Dalam Pembuatan Model Pemberdayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Makalah disampaikan pada *Round Table* "Program Pangan untuk Keluarga Miskin dan Rawan Pangan" Badan BIMAS Ketahanan Pangan, 9 Oktober 2001, Jakarta.
- Tjondronegoro, S.M.P. 1977. The Organization Phenomenon and Planned Development in Rural Communities of Java: A Case Study of Kecamatan Cibadak, West Java and Kecamatan Kendal, Central Java. University of Indonesia. Jakarta. (Disertasi tidak dipublikasikan).
- Van-Dieren, W. 1995. Taking Nature Into Account: A Report to the Club of Rome Toward a Sustainable National Income. Copernicus, Springer-Verlag New York Inc. New York.
- Varma, S.P. 1975. Teori Politik Modern. Rajawali Pers. Jakarta.
- Weber, M. 1964. The Theory of Social and Economic Organization, (translated by A.M. Henderson and T. Parsons). The Free Press. New York.
- Wertheim, W.F. 1976. The Rising Waves of Emancipation: from Counterpoint toward Revolution. *in* Sociology and Development (edited by E. de Kadt and G. Williams). Tavistock Publication. London.
- Zaltman, G and R. Duncan. 1977. Strategies for Planned Change. John Wiley & Sons. New York.